RAPAT PERMUSYAWARATAN, PEMERIKSAAN PERSIAPAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Nama : Rafid Naufal Raiftissia
Email: rafidnaufal26.rn@gmail.com
No BP: 2010003600319
Perguruan Tinggi : Universitas Ekasakti

Abstract

Consultative Meeting is the preliminary stage before examining the main dispute in the State Administrative Court. A consultative Meeting is an examination of a lawsuit that authorizes the Chairperson of the Court not to accept or declare a claim that is not based on a decision. This provision is found in Article 62 of Law number 5 of 1986. Within 14 days of the reading of the stipulation, a challenge can be made which will be examined by a quick procedure.

Examination of preparations is a preliminary stage before examining the main dispute in the State Administrative Court or a stage to finalize the case. In the law of State Administrative Procedures there is an obligation for judges to conduct an Examination of preparations before examining the subject matter of the dispute. The Examination of preparations Procedure is carried out after passing the Consultative Meeting agenda or after the lawsuit has passed the first stage of censorship and before the dispute examination is carried out.

Keywords : Consultative Meeting, Examination of preparations, the Administrative Court

Abstrak

Rapat Permusyawaratan merupakan tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dalam peradilan Tata Usaha Negara. Rapat permusyawaratan merupakan pemeriksaan gugatan yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk tidak menerima atau menyatakan gugatan tidak berdasar dengan suatu penetapan. Ketentuan ini ditemui dalam Pasal 62 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam jangka waktu 14 hari dari pembacaan penetapan tersebut, dapat dilakukan perlawanan yang akan diperiksa dengan acara cepat.

Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau suatu tahapan untuk mematangkan perkara. Dalam hukum Acara Tata Usaha Negara ada kewajiban bagi Hakim untuk mengadakan Pemeriksaan Persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Acara Pemeriksaan Persiapan dilakukan setelah melewati acara Rapat Permusyawaratan atau setelah gugatan lewat sensor tahap pertama dan sebelum pemeriksaan sengketa dilakukan.

Kata Kunci : Rapat Permusyawaratan, Pemeriksaan Persiapan, Pengadilan Tata Usaha Negara

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang mengurus sengketa yang terjadi pada pelaksanaan administrasi negara atau tata usaha negara. Penegakan hukum dan keadilan ini

merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terdapat beberapa proses tahapan pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa di PTUN yaitu seperti rapat permusyawaratan (proses dismissal) dan pemeriksaan persiapan.]

Rapat Permusyawaratan merupakan tahap pemeriksaan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang bersifat rahasia. Dalam Rapat Permusyawaratan tersebut Ketua Pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar serta dituangkan dalam suatu penetapan.

Proses dismissal atau rapat permusyawaratan merupakan proses penyaringan terhadap gugatan yang masuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di dalam Acara rapat permusyawaratan atau pemeriksaan dismissal dilakukan secara musyawarah apakah perkara tersebut diterima atau tidak.

Dalam beracara di PTUN terdapat keistimewaan yaitu adanya proses Pemeriksaan Persiapan yang terdapat dalam Pasal 63 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Proses ini merupakan pintu gerbang atau tahap awal dalam penyelesaian sengketa di PTUN. Pemeriksaan persiapan diadakan sebelum pemeriksaan persidangan jadi kepada Penggugat diberi kesempatan untuk menyempurnakan surat gugatannya yang belum sempurna dan kepada Tergugat dapat dimintai keterangan mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sehingga pemeriksaan persiapan itu dapat dilakukan, apabila surat gugatan tersebut telah lolos dari penelitian administrasi.

B. PEMBAHASAN

1. Rapat Permusyawaratan

Pada pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur tentang Rapat Permusyawaratan yang menyatakan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Pasal ini tidak mengatur secara terperinci bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam proses dismissal. Untuk mengisi kekosongan hukum acaranya, Mahkamah Agung dalam SEMA No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, antara lain mengatur sebagai berikut :

1. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai reporter (raportir).
2. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar Ketua) atau dilaksanakan secara singkat.
3. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dianggap perlu.
4. Penetapan Dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera. Wakil Ketua Pengadilan dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan.
5. Penetapan Dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.
6. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut (dismissal parsial).
7. Dalam hal ditetapkan dismissal parsial, ketentuan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal berlaku juga dalam hal ini.
8. Di dalam “mendismissal gugatan” hendaknya Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e.

Akibat hukum apabila Penetapan Dismissal Ketua dibenarkan atau menurut pendapat Majelis perlawanan gugatan perlawanan tidak berdasar atau tidak dapat diterima, maka terhadap putusan Majelis perlawanan yang dilakukan dengan acara singkat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum (Pasal 62 ayat 6). Akibatnya terhadap Penetapan Dismissal

Ketua Pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap seperti putusan akhir terhadap pokok perkaranya. Hasil rapat permusyawaratan dituangkan dalam suatu Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dan Panitera/Wakil panitera. Hasil penetapan ini diucapkan oleh Ketua Pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Proses rapat permusyawaratan sendiri tidak diatur secara khusus dalam undang-undang atau peraturan pelaksana. Tidak adanya aturan khusus ini membuat para ahli hukum memberikan definisi menurut pemaham mereka. Menurut **S.F. Marbun**, bahwa Acara Rapat Permasyarakatan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim Pemeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk. Penetapan atas hasil Rapat Permasyarakatan akan didengar oleh para pihak (penggugat dan Tergugat) sebelum hari sidang ditentukan.

2. Pemeriksaan Persiapan

Pemeriksaan Persiapan diatur dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, hakim wajib :

1. Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
2. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

4. Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pemeriksaan persiapan dilaksanakan dikarenakan Penggugat pada PTUN adalah warga masyarakat yang mempunyai keberadaan yang lemah, sedangkan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam posisi yang lemah tersebut, sulit untuk Penggugat mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka III, tanggal 9 Juli 1991, maka dapat disimpulkan bahwa acara pemeriksaan persiapan merupakan pemeriksaan pendahuluan terhadap surat gugatan yang dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara pada sidang acara biasa yang terbuka untuk umum.

Pada pemeriksaan persiapan, hakim diberi wewenang untuk memberi kesempatan kepada pihak penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya yang belum jelas atau belum sempurna dan dapat pula melengkapi dengan data-data, yang kemungkinan data dimaksud masih berada di tangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pemberian kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi data-data gugatannya itu harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Kalau kesempatan tersebut disia-siakannya maka akan berakibat gugatannya dinyatakan tidak di terima oleh Majelis (Pasal 63 ayat 3 dan 4).

Maka dari itu pemeriksaan persiapan dilaksanakan oleh Majelis Hakim sebelum di periksanya pokok perkara dan dilakukan tidak dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Katakanlah diruang kerja Hakim yang bersangkutan. Dalam periode pemeriksaan persiapan itu, dilakukan pengumpulan dokumen -dokumen atau informasi-informasi resmi yang

diperlukan yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa baik dari kedua pihak Tergugat maupun instansi-instansi lain. Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu.

Apabila pemeriksaan-pemeriksaan setempat seperti itu ternyata harus dilakukan diluar daerah hukum PERATUN yang sedang memeriksa perkara yang bersangkutan, maka pemeriksaan tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana barang atau surat atau saksi yang harus diperiksa berada.

C. PENUTUP

Dari uraian yang sudah disampaikan dalam pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rapat permusyawaratan merupakan salah satu tahap pemeriksaan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang bersifat rahasia. Dalam Rapat Permusyawaratan tersebut Ketua Pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar serta dituangkan dalam suatu penetapan.
2. Rapat permusyawaratan diatur pada pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar
3. Pemeriksaan persiapan merupakan salah satu prosedur untuk mematangkan perkara, dengan memanggil Penggugat untuk menyempurnakan surat gugatannya yang belum

- sempurna atau belum jelas dan terhadap Tergugat dapat dimintai keterangan atau penjelasan berkenaan tentang Surat Keputusan yang diterbitkannya.
4. Pemeriksaan Persiapan diatur dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..